



SEMNAS Pagi 2013

ISBN 978-979-95951-8-8

PROSIDING B  
SIMPOSIUM PENELITIAN TERKINI PANGAN DAN GIZI  
**BIDANG GIZI MASYARAKAT  
DAN KEBIJAKAN PANGAN**

27 Juni 2013, Balai Kartini-Jakarta

Editor :  
Dodik Briawan  
Hardinsyah



Diterbitkan  
**PERGIZI PANGAN INDONESIA**



MNAS PAGI 2013

PROSIDING B  
SIMPOSIUM PENELITIAN TERKINI PANGAN DAN GIZI  
**BIDANG GIZI MASYARAKAT  
DAN KEBIJAKAN PANGAN**

27 Juni 2013, Balai Kartini-Jakarta

Editor :  
Dodik Briawan  
Hardinsyah



Diterbitkan  
**PERGIZI PANGAN INDONESIA  
2013**



## RINGKASAN

Masalah gizi utama di Indonesia saat ini adalah stunting, sehingga analisis tentang faktor risiko stunting menjadi penting. Studi di puskesmas di Makassar menunjukkan faktor risiko stunting adalah kejadian berat bayi lahir rendah, kelengkapan imunisasi, dan rendahnya pendidikan ibu. Faktor risiko stunting lainnya dari studi di NTT adalah pendapatan keluarga, pola asuh ibu, dan asupan gizi anak. Anak dengan riwayat stunting mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan yang tidak stunting. Studi di puskesmas di Surabaya menunjukkan tidak terdapat hubungan antara beban kerja ibu dengan status gizi balita, apabila pekerjaan ibu tergolong tidak berat dan adanya pengasuh pengganti selama ibu bekerja. Pada kajian pendampingan 2500 anak balita gizi kurang dan stunting di Surabaya ternyata hanya menurunkan 1% gizi kurang dan 1.2% stunting. Masalah gizi mikro yang dijumpai pada anak balita adalah anemia. Kejadian anemia pada anak balita diantaranya karena persepsi ibu yang kurang tepat tentang anemia. Studi tentang anak jalanan di Kota Medan menunjukkan sebagian besar subjek mempunyai kadar hemoglobin dengan kategori rendah dan sangat rendah, sedangkan aktivitas anak jalanan dengan kategori berat

*Review* studi dilakukan untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan. Dari 11 jurnal yang direview disimpulkan bahwa dukungan yang lebih baik pada ibu, baik dari petugas maupun keluarga dapat berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi. Studi ibu hamil di NTT menunjukkan sebesar 71.4% tidak tahu tentang manfaat konsumsi Fe, sebanyak 1.4% belum pernah memeriksa kehamilan, sedangkan 15.7% memeriksa kehamilan namun tidak sesuai dengan anjuran. Terdapat 13% ibu mengatakan tidak pernah mengonsumsi Fe selama kehamilan.

Analisis terhadap faktor risiko kegemukan dilakukan pada kelompok wanita usia dewasa (19-55 tahun) menggunakan data Riskesdas 2010. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya mempromosikan aktivitas fisik dan diet yang sehat terutama menurunkan konsumsi makanan dan minuman manis dan konsumsi karbohidrat yang tidak berlebih untuk pencegahan dan pengendalian kegemukan. Studi di Kota Malang menunjukkan kombinasi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) adalah kebiasaan merokok setiap hari, konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 kali penyajian setiap hari, aktivitas fisik rendah, *overweight* ( $IMT \geq 25 \text{ kg/m}^2$ ), tekanan darah sistolik  $\geq 140$  dan atau  $\geq 90 \text{ mm Hg}$ . Studi pada orang dewasa juga mengkonfirmasi bahwa sarapan merupakan faktor yang memengaruhi kejadian obesitas, yaitu subjek yang sarapan memiliki proteksi 2.4 kali untuk terhindar dari obesitas.

Analisis data Riskesdas 2010 pada wanita dewasa menunjukkan rata-rata konsumsi buah dan sayur wanita sebesar  $139.7 \pm 55.9 \text{ g}$  yang jauh lebih rendah dibandingkan anjuran WHO 400 g/hari. Hanya 1.0% subjek yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran 250–400 g/hari dan 0.2% subjek mengonsumsi buah dan sayur diatas 400 g/hari. Konsumsi sayur lebih tinggi dibanding konsumsi buah. Tentang preferensi konsumsi sayuran, hasil penelitian di daerah Kampus Unesa (Semarang) menunjukkan 78.3% anak balita tidak menyukai sayur dan 60.6% tidak suka ikan, dan konsumsi sayur harian 23.9 g dan ikan 19.9 g. Rendahnya konsumsi ikan dikarenakan ibu jarang membeli ikan dengan alasan mahal harganya, susah pengolahannya dan berbau anyir. Dengan

intervensi terintegrasi (pendidikan gizi, pelatihan teknologi, dan penguatan media informasi) di Madura terdapat peningkatan konsumsi sayuran pada ibu hamil.

Studi tentang perilaku gizi seimbang remaja di Kota Medan menunjukkan perilaku yang rendah. Selain itu ditemukan sebanyak 12 indikator (putri) dan 16 (putra) indikator gizi seimbang. Studi anak di lembaga PAUD di Kota Bogor menunjukkan perkembangan anak lebih baik setelah dilakukan intervensi pendidikan gizi seimbang dan tumbuh kembang anak. Dalam pengembangan pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar dari studi di Bogor dan Jakarta disarankan media komik berwarna dengan karakter kartun yang tokohnya menyukai olahraga dan musik merupakan alternatif pilihan media pendidikan gizi yang paling efektif dan layak. Untuk kelompok anak usia sekolah menengah pertama, pemberian materi pendidikan gizi dapat diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Studi ketahanan pangan di Kabupaten Serang menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang tergabung dengan organisasi atau kelembagaan pangan local, akan mengurangi peluang kerawanan pangan. Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa dalam ketahanan pangan rumahtangga perempuan berperan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (lingkungan sekitar) dan sumber daya manusia (pengetahuan lokal dan ketrampilan) untuk konsumsi pangan keluarga. Studi di Kabupaten Klaten dihasilkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas (misalnya lumbung paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, melainkan dikembangkan pada kegiatan yang sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan pangan lokalnya sudah pudar atau bahkan punah, maka perlu dibangun lagi.

Evaluasi Program DMP (Desa Mandiri Pangan) di 10 desa di 6 kabupaten menunjukkan bahwa pengaruh langsung kinerja fasilitator terhadap konsumsi pangan rumah tangga lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui variabel pengusahaan lahan pekarangan dan pelatihan budidaya. Studi kasus tentang kebijakan *One Day No Rice* (ODNR) di Kota Depok dilakukan dengan subjek 181 PNS dari eselon 2, 3, dan 4. Sebanyak 90% pejabat tersebut mendukung kebijakan ODNR, namun dalam keseharian hanya 44% yang dapat menerapkan untuk tidak mengkonsumsi beras.

## KATA PENGANTAR

Penerbitan Prosiding B, Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan merupakan salah satu dari tiga prosiding Simposium Nasional Pangan dan Gizi yang dirancang khusus untuk mempublikasikan 29 artikel hasil penelitian terkini di bidang pangan dan gizi dari 85 peneliti. Semua hasil penelitian ini dipresentasikan dan didiskusikan pada Simposium Nasional Pangan dan Gizi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013 di Balai Kartini, Jakarta.

Tema Simposium Nasional Pangan dan Gizi adalah inovasi Pangan dan Gizi Mewujudkan Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Simposium ini diselenggarakan oleh PERGIZI PANGAN Indonesia bekerjasama dengan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), PDGMI (Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia), PDGKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia), ISAGI (Ikatan Sarjana Gizi Indonesia), dan GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia).

Kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis, mitra pelaksana dan semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan Simposium Nasional Pangan dan Gizi dan penerbitan Prosiding Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan ini.

Selamat membaca, semoga memberi inspirasi baru dan menambah wawasan tentang berbagai inovasi atau penelitian tentang gizi dalam arti luas.

Redaksi



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Ringkasan.....  | i   |
| Kata Pengantar.....   | iii |
| Daftar Isi .....  | v   |
| <b>I. Masalah dan Determinan/Hubungan Gizi dan Kesehatan</b>  |     |
| <b>1. Faktor Risiko <i>Stunting</i> pada Anak Balita 12—59 Bulan di Wilayah Puskesmas Tamamaung Makassar</b><br><i>Asry Dwi Muqni, Veni Hadju, Nurhaedar Jafar</i> .....                                    | 1   |
| <b>2. Analisis Determinan dan Pengaruh <i>Stunting</i> Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah di Kupang Dan Sumba Timur, NTT</b><br><i>Intje Picauly dan Sarcy M. Toi</i> .....                             | 11  |
| <b>3. Beban Kerja dan Stres Ibu Bekerja, Kaitannya dengan Status Gizi Balita</b><br><i>Fita Diana Puspita dan Lailatul Muniroh</i> .....  | 23  |
| <b>4. Penurunan Balita Kurus dan Pendek dengan Program Mitra Gizi (Pendampingan Keluarga) Balita di Kota Surabaya</b><br><i>Andriyanto, Annas Buanasita, Luki Mundiastuti, Kartika, Dhenok Widari</i> ..... | 33  |
| <b>5. Aspek Gizi dan Kesehatan Santri yang Memiliki dan Tidak Memiliki Poskestren</b><br><i>Lailatul Muniroh dan Muji Sulistyowati</i> .....  | 47  |
| <b>6. Perbedaan Persepsi dan Asupan Protein dan Zat Besi Pada Anak Anemia dan Non-Anemia Umur 1—3 Tahun di Kota Surakarta</b><br><i>Yanti Ernalina, Hamam Hadi, Retna Siwi Padmawati</i> .....              | 59  |
| <b>7. Hubungan Antara Status GAKY dan Status Anemia dengan Kesegaran Jasmani pada Anak Sekolah Dasar di Daerah Endemik GAKY</b><br><i>Yhona Paratmanitya, Toto Sudargo, Nur Hidayat</i> .....               | 71  |
| <b>8. Hubungan Kebiasaan Makan dengan Kadar Glukosa dan Hemoglobin Darah Serta Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Anak Jalanan di Kota Medan</b><br><i>Ginta Siahaan, Fauzi Romeli dan Oslida Martony</i> ..... | 83  |
| <b>9. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Besi - Folat Selama Kehamilan</b><br><i>Wiradnyani LAW, Khusun H dan Achadi EA</i> .....   | 99  |
| <b>10. Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia</b><br><i>Rian Diana, Indah Yuliana, Ghaida Yasmin, Hardinsyah</i> .....  | 113 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>11. Analisis Kesehatan Istri pada Rumah Tangga Sangat Miskin dalam Kerangka Acuan Program Keluarga Harapan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur</b><br><i>A. Iskandar</i> .....   | 123 |
| <b>12. Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Hubungan Dengan Skor Kualitas Diet dan Status Sosial Ekonomi</b><br><i>Nurul Muslihah, AS Zakaria dan Wulandary</i> .....   | 133 |
| <b>II. Intervensi atau Pengaruh Gizi dan Kesehatan</b>  |     |
| <b>13. Kemampuan Ibu Bekerja Memberikan Asupan Makanan Anak 6—59 Bulan Sesuai Konsep Keberagaman Jenis dan Faktor yang Berhubungan: Analisis Data SDKI 2007</b><br><i>Aria Kekalih, Judhiastuty Februhartanty, Anuraj Shankar</i> ..... | 143 |
| <b>14. Kualitas Diet dan Hubungan dengan Pengetahuan Gizi, Status Gizi, dan Status Sosial Ekonomi</b><br><i>Nurul Muslihah, Sri Winarsih, Soemardini, AS Zakaria dan Zainudiin</i> .....  | 153 |
| <b>15. Analisis Konsumsi Buah dan Sayur pada Wanita Indonesia</b><br><i>Zaini Muharram dan Hardinsyah</i> .....   | 163 |
| <b>16. Konsumsi Sayuran dan Ikan Terhadap Status Gizi dan Kesehatan Anak Balita di Wilayah Lingkar Kampus Unnes Gunungpati Semarang</b><br><i>Sus Widayani</i> .....  | 173 |
| <b>17. Analisis Perilaku Gizi Seimbang pada Remaja Berbasis Gender</b><br><i>Esi Emilia dan Meuthia Fadila</i> .....  | 189 |
| <b>18. Pengaruh Intervensi Terintegrasi dalam Meningkatkan Konsumsi Sayuran bagi Ibu Hamil Etnis Madura</b><br><i>Annis Catur Adi, Triska Susila N., Pulung Siswantara, Setya Pranata, Edy Herry P.</i> .....                           | 197 |
| <b>19. Pengaruh Intervensi Pendidikan Gizi Seimbang dan Tumbuh Kembang terhadap Kualitas Anak Usia Dini di Kota Bogor</b><br><i>Evy Damayanthi, Lilik Kustiyah, Cesilia M. Dwiriani dan Neti Hernawati</i> .....                        | 209 |
| <b>20. Kebiasaan Sarapan sebagai Faktor Protektif Obesitas pada Orang Dewasa</b><br><i>Andi Imam Arundhana, A Razak Thaha dan Nurhaedar Jafar</i> .....   | 221 |
| <b>21. Aktivitas, Media, dan Karakter Tokoh Favorit dalam Pengembangan Pendidikan Gizi bagi Anak Sekolah</b><br><i>Hardinsyah, Muhammad Aries, Cesilia Meti Dwiriani, Faika Dwiyanti dan Cyndy Au</i> .....                             | 229 |

### III. Perbaikan dan Kebijakan dll

|  |     |
|--|-----|
| <b>22. Pengembangan Model Pendidikan Gizi untuk Mencegah Timbulnya Masalah Gizi pada Remaja yang Berintegrasi dengan Kegiatan Sekolah</b><br><i>Ai Nurhayati, Tati Setiawati dan Cica Yulia</i> .....  | 237 |
| <b>23. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Watubonang dan Dayakan Kec. Badegan Kab. Ponorogo sebagai Upaya Penanggulangan GAKY Berbasis Budaya</b><br><i>Lilik Rosidah, Agus Hartono dan Laili Rahmawati</i> .....                                  | 247 |
| <b>24. Kuasa Pengetahuan Ketahanan Pangan dan Pembentukan Ketahanan Pangan Rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten Indonesia</b><br><i>Titik Sumarti dan Mahmudi Siwi</i> .....   | 257 |
| <b>25. Peran Perempuan dalam Pemenuhan Konsumsi Pangan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal untuk Mencapai Ketahanan Pangan Keluarga di Pedesaan</b><br><i>Yunindyawati, Titik Sumarti, Soeryo Adiwibowo, Aida Vitayala, Hardinsyah</i> ..... | 283 |
| <b>26. Kajian Program Pemberdayaan Petani pada Komunitas Rawan Pangan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Indonesia: Tinjauan Sosiologi Kelembagaan</b><br><i>Siti Masithoh, Titik Sumarti, Tri Pranadji</i> .....                                 | 295 |
| <b>27. Pengaruh Kinerja Fasilitator Terhadap Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Lampung</b><br><i>Wuryaningsih Dwi Sayekti dan Rabiatul Adawiyah</i> .....  | 307 |
| <b>28. Pendapat dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Depok terhadap Kebijakan Walikota tentang Gerakan <i>One Day No Rice</i></b><br><i>Guspri Devi Artanti dan Vera Nelasari</i> .....  | 315 |
| <b>29. Dinamika Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat di Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Tebu (Kasus Di Kabupaten Malang dan Lumajang)</b><br><i>Tri Bastuti Purwantini</i> .....  | 325 |
| <b>30. Pola Konsumsi Pangan Hewani Remaja Indonesia</b><br><i>Trikorian Adesanjaya dan Hardinsyah</i> .....  | 341 |
| <b>Diskusi Simposium Penelitian Terkini Pangan dan Gizi Bidan Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan</b> .....   | 349 |



**KUASA PENGETAHUAN KETAHANAN PANGAN DAN PEMBENTUKAN KETAHANAN PANGAN  
RUMAHTANGGA DI KABUPATEN SERANG, BANTEN INDONESIA**  
*(Food Security Authorization of Knowledge and Formation of Household Food Security in The District  
Serang, Banten Indonesia)*

Titik Sumarti<sup>1\*</sup>, Mahmudi Siwi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) – IPB, -

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kuasa pengetahuan ketahanan pangan dan bagaimana pengetahuan tersebut menentukan pembentukan ketahanan pangan rumahtangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, subjek penelitian terdiri dari pejabat, tokoh masyarakat, dan rumahtangga. Pejabat dan pengusaha dipilih pada tingkat kabupaten dan kecamatan terpilih, sedangkan tokoh masyarakat dan rumahtangga pada kecamatan terpilih. Data yang dikumpulkan meliputi: persepsi ketahanan pangan individu, rumahtangga dan daerah, kondisi sosial ekonomi rumahtangga dan ketahanan pangan rumahtangga, serta modal sosial. Ketahanan pangan rumahtangga diukur secara kualitatif menggunakan persepsi subjek. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan pengetahuan antara warga, elit lokal dan aparat pemerintah tentang ketahanan pangan individu, rumahtangga dan daerah, implementasi konsep ketahanan pangan pemerintah menghadapi kendala dan tantangan. Sebagian besar rumahtangga masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok dan 73.4% memperoleh dengan cara membeli. Masih banyak rumahtangga yang menyatakan konsumsi makanan sehari-hari tidak mencukupi, sebagian rumah tangga khawatir tidak dapat menyediakan makanan bergizi seimbang untuk rumah tangga dan anak-anak, persediaan beras habis. Semakin banyak organisasi atau kelembagaan pangan lokal yang diikuti akan mengurangi peluang kerawanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu kuasa pengetahuan tentang ketahanan pangan dan modal sosial turut menentukan kondisi ketahanan pangan rumahtangga.

**Kata kunci:** ketahanan pangan, modal sosial, sosial ekonomi

**PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan kepada masalah ketahanan pangan yang sangat serius. Masalah ketahanan pangan yang dihadapi ini, tidak hanya terbatas pada *sistem produksi* (ketersediaan), melainkan juga pada *sistem distribusi* dan *sistem konsumsi* (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Secara umum masalah pokok yang dihadapi pada sistem ketersediaan pangan di Indonesia adalah laju peningkatan produksi (penyediaan) pangan nasional belum mampu mengejar laju peningkatan kebutuhan pangan penduduk. Kondisi ini ditunjukkan dengan berbagai fakta yang menunjukkan adanya ketergantungan negara kita terhadap impor pangan luar negeri untuk beberapa komoditas pangan tertentu (seperti beras, gandum dan kedelai) tergolong sangat tinggi. Dalam kasus beras, pada tahun 1998-1999<sup>1</sup> Indonesia mengimpor beras rata-rata kurang

---

<sup>1</sup> Jumlah impor beras pada tahun tersebut lebih disebabkan karena penurunan produksi padi karena kemarau panjang (El Nino) yang bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi. Meskipun sudah terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencapai rata-rata 500 ribu ton pada tahun 2004-2005, namun bukan tidak mungkin angka ini akan meningkat

\*Penulis korespondensi : titik\_sumarti@yahoo.com

lebih sebanyak 4 juta ton/tahun dan menempatkan negara kita sebagai importir beras terbesar dunia. Sedangkan dalam kasus komoditi gandum, menurut Sawit (2006), sejak tahun 1996 setiap tahun negara kita mengimpor rata-rata 4 juta ton dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-6 pengimpor gandum terbesar di Dunia. Demikian pula halnya dengan kedelai, data tahun 1999-2000<sup>2</sup> menunjukkan bahwa impor rata-rata kedelai mencapai 1.28 juta ton/tahun dan cenderung meningkat. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas gula, jagung, daging, buah-buahan dan sayur-sayuran, negara Indonesia masih mengimpor dengan jumlah yang tidak sedikit.

Sementara itu dalam sistem distribusi pangan, negara kita dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang dapat menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, sistem distribusi pangan untuk mengatasi daerah-daerah rawan bencana masih belum tertata dengan baik dan belum bekerja secara efektif, masih banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi sehingga harga pangan yang sampai ke tingkat rumah tangga tidak menunjukkan harga yang sebenarnya, serta kelembagaan pasar yang ada belum mampu menjamin terciptanya sistem distribusi yang adil, merata dan terjangkau. Dampak dari semua masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada semakin lemahnya kemampuan rumah tangga (terutama rumah tangga petani miskin) untuk dapat mengakses pangan secara cukup dan terjangkau.

ola konsumsi masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum mampu mendukung ketahanan pangan dan hal ini ditunjukkan dengan kebergantungan yang masih sangat tinggi terhadap beras. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah masa lalu yang berusaha mempertahankan harga beras yang relatif rendah sehingga mendorong pola konsumsi masyarakat yang cenderung tergantung pada beras. Sedangkan program diversifikasi pangan selain tidak optimal juga menunjukkan gejala salah arah, yaitu bergeser kearah diversifikasi pangan berbasis gandum. Selain itu masalah konsumsi masyarakat yang paling penting adalah besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang berpendapatan rendah, sehingga mereka tidak mampu mengakses pangan secara cukup, seimbang dan bergizi. Pada tataran keluarga, maka pihak yang paling rentan terhadap masalah kekurangan pangan dan gizi adalah perempuan dan anak-anak. Hardinsyah (2001) mengungkapkan bahwa tiga dari 10 anak balita Indonesia mengalami gizi kurang (KEP), tiga dari sepuluh wanita hamil mengalami kurang energi kronik (KEK), enam dari 10 keluarga berpotensi mengalami rawan pangan (*food insecurity*) karena tidak mampu memenuhi dua pertiga dari kebutuhan pangannya, dan sebagian penduduk belum mengkonsumsi pangan hewan, sayur dan buah dalam jumlah yang memadai setiap harinya.

Masalah ketahanan pangan pada hakikatnya akan sangat terkait erat dengan masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39.05 juta (17.75 %). Sebagian besar penduduk miskin tersebut yaitu sekitar 63.41 % berada di pedesaan dan pada umumnya bergantung pada sektor pertanian. Hasil Sensus Pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar produksi pangan

---

kembali jika : (1) upaya peningkatan diversifikasi pola konsumsi rakyat yang cenderung pada beras tidak berubah, (2) produksi padi menurun yang diakibatkan oleh kegagalan panen karena bencana alam dan kekeringan, dan (3) jika tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah yang tepat dan efektif di bidang distribusi dan pemasaran beras nasional, serta ekspor dan impor.

<sup>2</sup> Sumber : Data Base Pemasaran Internasional Kedelai, Deptan Tahun 2005.

di Indonesia diadakan oleh para petani skala kecil atau petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0.5 hektar dan buruh tani. Data-data menunjukkan bahwa selama periode tahun 1993-2003 terjadi kecenderungan peningkatan jumlah rumah tangga pertanian dan jumlah petani gurem di pedesaan Jawa dan luar Jawa. Sebagian besar petani gurem tersebut, yaitu sekitar 75 persen, berada di pedesaan Jawa dan seluruhnya tergolong miskin dan rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, seyogyanya dapat difahami bahwa pokok masalah ketahanan pangan dan juga masalah kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah pembangunan masyarakat pedesaan. Sehingga arah pembangunan ketahanan pangan seharusnya difokuskan pada upaya-upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di pedesaan, khususnya keluarga petani gurem. Jika masalah kemiskinan di pedesaan dapat dipecahkan, maka hal ini secara langsung maupun tidak langsung juga berarti terpecahkannya masalah ketahanan pangan di pedesaan dan begitu pula sebaliknya.

Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan seperti KUT, IDT, Raskin dan BLT secara empiris terbukti belum efektif dan banyak kasus menemui kegagalan. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan implementasi program yang tidak partisipatif dan mengabaikan modal sosial lokal (sumberdaya manusia, jaringan sosial, kelembagaan). Banyak kasus menunjukkan ditemukan adanya penyelewengan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam implementasi program-program tersebut. Penyelewengan tersebut terjadi karena kesengajaan para pelakunya atau pun karena kebijakan yang terlalu berorientasi pada proyek dengan target waktu yang terlalu kaku serta mendesak. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan dan implementasi program tersebut mengabaikan partisipasi keluarga miskin sebagai subjek utama. Akhirnya, program-program pembangunan hanya dinikmati oleh golongan lapisan elit desa dan kerabat-kerabatnya yang secara sosial-ekonomi relatif mampu. Kondisi ini selaras dengan apa yang dikemukakan Chambers (1987) bahwa jaringan kekerabatan dan koneksi kelompok lapisan elit pedesaan kerap kali menjadi "jaring penangkap" bagi bantuan-bantuan yang diperuntukan bagi keluarga-keluarga miskin.

Kebijakan dan implementasi pembangunan pertanian di pedesaan pada masa pemerintahan Orde Baru lebih banyak ditekankan pada upaya peningkatan produksi pangan (terutama beras) yang dilakukan secara terpusat, searah (*top-down*) dan seragam. Sebagaimana halnya program Revolusi Hijau yang didasarkan pada penyebaran "teknologi baru" berupa bibit unggul dan penambahan pemakaian pupuk dan bahan kimia, meskipun berhasil meningkatkan produksi pangan (beras) nasional, namun karena tanpa didukung dengan pembangunan kapasitas diri manusia dan kapasitas kelembagaan lokal yang kuat, pada akhirnya terbukti tidak mampu mempertahankan keberlanjutan swasembada beras. Meskipun pemerintah di masa lalu telah berupaya membangun kelembagaan di tingkat desa (seperti kelompok tani, pemerintahan desa dan KUD), namun karena dibentuk dan dijalankan secara terpusat, maka kelembagaan-kelembagaan tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan supra-desa dan memarginalkan kepentingan masyarakat strata bawah. Sehingga terjadi kesenjangan dalam hal memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan di bidang pertanian. Lembaga-lembaga tersebut terbukti hingga sekarang belum mampu membangun instrumen untuk mendistribusikan hasil-hasil capaian tersebut secara adil dan merata di antara

anggota masyarakat desa. Kondisi seperti ini, digambarkan oleh Sayogyo (1982) sebagai proses modernisasi yang tidak diiringi dengan proses pembangunan (*modernization without development*).

Berdasarkan pada adanya masalah-masalah di atas, maka sebagaimana dikemukakan Pakpahan dkk. (2006), menjadi perlu adanya upaya-upaya dan tindakan konkrit untuk membangun sebuah ideologi pembangunan pertanian berkeadilan yang dapat mempertemukan dan mengharmoniskan antara kepentingan negara (pemerintah) dengan kepentingan petani. Pada dasarnya pembangunan pertanian yang ideal akan dapat diwujudkan jika bersendikan pada "kemandirian" dan "keberpihakan", dalam pengertian petani seharusnya diberdayakan untuk mandiri dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan usaha pertaniannya dan pemerintah memberikan dukungan dan keberpihakan untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Tentunya dengan landasan ideal seperti ini akan membawa konsekwensi pada perubahan bentuk, sifat, struktur dan ruang lingkup kelembagaan pelayanan publik pertanian, yang mengarah pada upaya pemberdayaan petani melalui penguatan kapasitas diri petani, pengembangan jaringan kerjasama dan kelembagaan-kelembagaan lokal hingga tingkat komunitas.

Oleh karena itu permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana implementasi program-program ketahanan pangan rumahtangga miskin? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan program tersebut? Sejauhmana modal sosial dan kelembagaan lokal sudah dipertimbangkan dalam program?

## **METODE**

### **Disain, Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan bulan November 2009, di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kabupaten Serang dipilih karena merupakan daerah yang relatif lebih rawan pangan di banding kabupaten lain di Provinsi Banten, dan merupakan daerah dengan ekologi berupa dataran rendah.

Penelitian dilakukan di dua desa pada dua kecamatan, yaitu (1) Desa Kubang Puji dan Desa Kencana Harapan, Kecamatan Pontang; dan (2) Desa Kadikaran dan Desa Pamong, Kecamatan Ciruas.

### **Penentuan Subjek**

Subjek terdiri dari pejabat dan pengusaha, tokoh masyarakat, serta rumahtangga. Pemilihan sample dilakukan di setiap lokasi terpilih. Pejabat dan pengusaha dipilih pada tingkat kabupaten dan kecamatan terpilih, sedangkan tokoh masyarakat dan rumahtangga pada kecamatan terpilih.

Sebanyak 50 rumahtangga dipilih secara purposif dari setiap desa terpilih. Pemilihan secara purposif berdasarkan keterlibatan rumahtangga pada program-program ketahanan pangan dan kemiskinan, meliputi: (1) Program Desa Mandiri Pangan (mapan);(2) Program Diversifikasi Pangan; (3) Program Lumbung Desa; (4) Program Peningkatan Ekonomi; (5) Program lainnya; dan (6). Non-penerima program. Secara lengkap jumlah sample penelitian tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks jumlah subjek penelitian

| Level                  | Pejabat/<br>Tokoh Masyarakat/<br>Pengusaha | Rumahtangga |
|------------------------|--|-------------|
| Kabupaten Serang       | 18   |             |
| 1. Kecamatan Ciruas    | 12   |             |
| - Desa Pamong          |  | 53          |
| - Desa Kadikaran       |  | 52          |
| 2. Kecamatan Pontang   | 13   |             |
| - Desa Kencana Harapan |  | 55          |
| - Desa Kubangpuji      |  | 54          |
| <b>Total</b>           | <b>43</b>                                  | <b>214</b>  |

**Jenis dan Cara Pengumpulan data**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memperkaya data dan memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Pada aras meso, dilakukan pengambilan data primer dan sekunder yang meliputi pelaksanaan program-program ketahanan pangan yang sudah dan sedang berjalan, cakupan dan pendanaan program ketahanan pangan, persepsi/pemahaman tentang program ketahanan pangan serta faktor sukses dan gagal dari program tersebut, dan saran perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan untuk akselerasi terwujudnya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. Pada aras meso ini akan dilakukan wawancara mendalam pada berbagai stakeholder yaitu pejabat eksekutif dan legislatif, serta tokoh masyarakat setempat di lokasi terpilih.

Pada aras mikro akan dilakukan wawancara terstruktur pada rumahtangga terpilih yang meliputi data: karakteristik sosial ekonomi, keterlibatan dan peran dalam program, manfaat yang diperoleh dari program yang diterima, persepsi rumahtangga tentang faktor sukses dan gagal dari program tersebut, dan saran perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan pada level rumahtangga. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk menemukan model program peningkatan ketahanan pangan rumahtangga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan pada berbagai tipologi wilayah dan komoditas yang dirumuskan oleh komunitas itu sendiri. Sumber dan cara pengumpulan data terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumber dan cara pengumpulan data

| Jenis data yang dikumpulkan   | Sumber data dan teknik pengumpulan data   |
|---|---|
| Data kualitatif:  |   |
| o Kebijakan dan program ketahanan pangan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) | Data sekunder dari buku laporan pelaksanaan dan penelitian program ketahanan pangan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan arsip di tingkat, kecamatan dan desa.<br>Data primer melalui wawancara mendalam pada berbagai stakeholder (pejabat eksekutif dan legislatif, serta tokoh masyarakat) |

| Jenis data yang dikumpulkan  | Sumber data dan teknik pengumpulan data  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persepsi/pemahaman tentang situasi, kondisi dan program ketahanan pangan serta faktor sukses dan gagal dari program tersebut</li> <li>○ Saran perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan</li> <li>○ Identifikasi modal sosial dan kelembagaan ketahanan pangan lokal</li> </ul>  | <p>Wawancara mendalam pada berbagai stakeholder (pejabat eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat).</p> <p>Wawancara terstruktur pada rumahtangga terpilih.</p> <p>Wawancara terstruktur pada rumahtangga terpilih.</p>                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ketahanan pangan kualitatif (tahan pangan, rawan pangan dan kelaparan)</li> </ul>   | <p>Wawancara persepsi ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dengan menggunakan kuesioner ketahanan pangan dari rumusan BKP Deptan serta kuesioner Ellen Kennedy Diperoleh dari data sekunder kabupaten dan kecamatan (laporan-laporan)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Potensi pangan wilayah tingkat kabupaten dan kecamatan (produksi, ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, tingkat kesuburan lahan)</li> <li>○ Sosial ekonomi rumahtangga (umur, pendidikan, jumlah anggota rumahtangga, kegiatan ekonomi rumah tangga, pendapatan, akses terhadap pangan, alokasi tenaga kerja dan pengambil keputusan)</li> </ul> | <p>Wawancara terstruktur pada rumahtangga terpilih.</p>  |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan, Program, Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Serang

Visi kabupaten Serang tahun 2006 – 2011 adalah “terwujudnya pemerintahan yang amanah menuju Kabupaten Serang Terdepan yang Islami, Berkeadilan dan Sejahtera”. Selanjutnya salah satu arah kebijakan kabupaten Serang adalah peningkatan potensi ekonomi daerah secara sinergis. Arah kebijakan pembangunan peningkatan potensi ekonomi daerah secara sinergis meliputi semua sektor, yaitu: Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, PDAM dan Pariwisata. Pada dua sektor utama, yaitu: sektor pertanian dan sektor perikanan dan kelautan, upaya yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan pertanian rakyat terpadu. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agrobisnis.
2. Pengembangan agribisnis. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang agrobisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya.
3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan berkelanjutan ketahanan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional.

4. Pengembangan usaha perkebunan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha petani perkebunan rakyat.
5. Pengelolaan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah dan rehabilitasi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
6. Pengembangan perhutanan sosial dan hutan pantai. Program ini bertujuan lebih memanfaatkan potensi sumberdaya alam hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat luas.
7. Peningkatan usaha kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Badan Bimas Ketahanan Pangan (2004), merumuskan konsepsi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari : (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dari unsur-unsur yang merupakan subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.

Pembangunan subsistem ketersediaan men-cakup pengaturan kestabilan dan ke-sinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi dalam negeri, cadangan maupun impor dan ekspor. Pembangunan subsistem distribusi mencakup aksesibilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Pembangunan subsistem konsumsi mencakup jumlah, mutu, gizi/nutrisi, keamanan, dan keragaman konsumsi pangan.

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan ketahanan pangan dan gizi kabupaten Serang, menunjukkan bahwa program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan gizi sudah tersebar di tiga subsistem: ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Pada subsistem ketersediaan/ produksi, selain menekankan pada peningkatan dan pengembangan produksi, juga telah menekankan pada kegiatan penyimpanan (lumbung pangan desa), dan pengembangan cadangan pangan daerah serta didukung beragam kebijakan: perberasan, subsidi pertanian, pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Pada subsistem distribusi, juga menekankan pada pengembangan sistem informasi pasar dan pengembangan model distribusi pangan yang efisien untuk mendukung terjaminnya kestabilan harga pangan dan aksesibilitas pangan antar daerah dan antar waktu. Sementara pada subsistem konsumsi, selain menekankan jumlah, keragaman, mutu dan keamanan pangan, juga telah mengembangkan pemanfaatan pekarangan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan pangan dan status gizi keluarga.

### **Persepsi Pejabat dan Tokoh tentang Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan baik individu, rumah tangga dan daerah turut ditentukan oleh relasi-relasi kekuatan yang ada disekitarnya. Bentuk-bentuk relasi tersebut dapat dilihat dari pilihan pangan bagi individu, dan rumah tangga, serta pilihan program pangan yang dijalankan pemerintah daerah. Disamping itu, relasi-relasi kekuatan tersebut juga dibangun oleh pengetahuan yang

melingkupi proses ketahanan pangan. Menurut Foucault (Ritzer, 2012) bekerjanya pengetahuan dilihat sebagai proses yang menghasilkan kekuasaan, dan kemudian kekuasaan secara bersamaan akan membentuk pengetahuan.

Dalam penelitian ini, relasi-relasi kekuasaan dilihat dari kuasa pengetahuan ketahanan pangan yang ada ditinggal individu, rumahtangga dan pejabat. Kuasa pengetahuan dilihat dari persepsi subjek tentang ketahanan pangan.

Merujuk hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar subjek pejabat dan tokoh masyarakat (43 subjek) di Kabupaten Serang mempunyai tingkat pendidikan SMU dan Sarjana. Dari sebanyak 43 orang subjek tersebut, subjek yang memiliki tingkat pendidikan SMU dan sarjana ini masing-masing sebesar 27.9 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Semakin baik tingkat pendidikan yang dimiliki, maka seharusnya informasi yang diterima juga akan semakin banyak dan baik karena akses terhadap berbagai informasi menjadi semakin terbuka. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai persepsi, biasanya latar belakang pendidikan subjek berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Hardinsyah dan Yunita (1997) menyatakan bahwa persepsi tentang sesuatu merupakan interpretasi atau respon kesadaran seseorang terhadap lingkungan atau stimulasi yang diperolehnya. Selain itu, persepsi juga dinyatakan sebagai pendapat atau opini seseorang dari stimulus yang diterimanya; atau respon seseorang terhadap apa yang didengar, dibaca, dilihat, dirasakan dan dibaui akibat faktor lingkungannya.

Belch dan Belch (1995) menyatakan bahwa informasi, baik yang dilihat, dibaca, didengar atau dirasakan akan menjadi pengetahuan bagi seseorang dan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objek tertentu, termasuk mengenai ketahanan pangan. Pengetahuan seseorang merupakan aspek kognitif yang dimiliki seseorang dari merekam atau mengingat dari segala informasi yang diperoleh, baik tentang lingkungannya (*general knowledge*) maupun tentang bagaimana melakukan sesuatu – bertindak (*procedural knowledge*) atau dala hal ini dapat dikatakan akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pada umumnya subjek mempunyai tingkat pendidikan yang baik tetapi tidak semuanya menyatakan tahu mengenai ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan individu, ketahanan pangan rumah tangga, maupun ketahanan pangan daerah. Sebagian besar responden menyatakan tahu mengenai definisi ketahanan pangan (baik pada individu, rumah tangga, maupun daerah) tetapi hanya sebagian kecil yang bisa menjawab dengan benar ketiga definisi ketahanan pangan tersebut. Pada penelitian ini, subjek yang menyatakan tidak tahu definisi ketahanan pangan maka subjek tersebut dinyatakan salah dalam menjawab definisi ketahanan pangan. Data mengenai pengetahuan ketahanan pangan subjek disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengetahuan subjek mengenai definisi ketahanan pangan

| Aspek Pengetahuan Ketahanan Pangan                 | Jumlah | Persentase |
|--|--------|------------|
| <u>Tahu definisi ketahanan pangan Individu</u>     |        |            |
| Ya   | 34     | 79.1       |
| Tidak  | 9      | 20.9       |
| Menjawab benar                                     | 12     | 72.1       |
| Menjawab salah                                     | 31     | 27.9       |
| <u>Tahu definisi ketahanan pangan rumah tangga</u> |        |            |
| Ya   | 36     | 83.7       |
| Tidak  | 7      | 16.3       |
| Menjawab benar                                     | 13     | 30.2       |
| Menjawab salah                                     | 30     | 69.8       |
| <u>Tahu definisi ketahanan pangan daerah</u>       |        |            |
| Ya   | 29     | 67.4       |
| Tidak  | 14     | 32.6       |
| Menjawab benar                                     | 5      | 11.6       |
| Menjawab salah                                     | 38     | 88.4       |

Merujuk data Tabel 3, terlihat bahwa pengetahuan subjek mengenai ketahanan pangan berbeda definisi yang berlaku menurut aturan yang ada. Hal ini diperkuat dengan jawaban mengenai definisi ketahanan pangan yang mereka berikan. Pada umumnya mereka memberikan jawaban yang terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Bagi subjek yang sehari-hari bekerja di dinas pertanian, umumnya jawaban yang mereka berikan dikaitkan dengan pangan dan produksi pertanian yang harus ditingkatkan, lalu bagi yang sehari-hari bekerja di dinas kesehatan maka jawaban yang diberikan berkaitan dengan konsumsi pangan yang harus memenuhi prinsip 4 sehat 5 sempurna atau harus mengandung zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) yang lengkap sedangkan jawaban yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang tidak bekerja di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan pemenuhan pangan yang diiringi dengan sandang dan papan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan ketahanan pangan belum merupakan hal yang diketahui secara umum. Subjek yang menjawab benar hanya subjek yang berasal dari instansi pemerintahan yang memang pekerjaannya terkait dengan permasalahan ketahanan pangan.

Persepsi subjek terhadap ketahanan pangan diri, ketahanan pangan rumah tangga, dan ketahanan daerah sangat dipengaruhi oleh pengetahuan subjek, khususnya pengetahuan mengenai ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek menyatakan bahwa mereka serta rumahtangganya tahan pangan (baik yang menyatakan tahan maupun sangat tahan dikategorikan sebagai tahan pangan), tetapi jumlah subjek yang menyatakan biasa saja juga cukup besar, yaitu masing-masing 34.9 persen (ketahanan pangan diri dan ketahanan pangan rumah tangga) dan 46.5 persen (ketahanan pangan daerah). Hal ini terjadi karena kemungkinan mereka tidak yakin dengan jawaban yang mereka berikan pada saat menjawab definisi ketahanan pangan.

Dengan memberikan jawaban yang tidak mereka yakini, maka mereka juga jadi tidak yakin untuk menilai apakah mereka, rumah tangganya, serta daerah yang mereka tinggali tahan pangan atau tidak. Data persepsi subjek terhadap ketahanan pangan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi subjek mengenai ketahanan pangan diri, rumah tangga, dan daerah

| Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan   | Jumlah | Persen |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <u>Ketahanan pangan diri</u>         |        |        |
| Tidak menjawab                       | 0      | 0      |
| Tidak tahan                          | 1      | 2.3    |
| Biasa saja                           | 15     | 34.9   |
| Tahan                                | 22     | 51.2   |
| Sangat tahan                         | 5      | 11.6   |
| <u>Ketahanan pangan rumah tangga</u> |        |        |
| Tidak menjawab                       | 0      | 0      |
| Tidak tahan                          | 2      | 4.7    |
| Biasa saja                           | 15     | 34.9   |
| Tahan                                | 18     | 41.9   |
| Sangat tahan                         | 8      | 18.6   |
| <u>Ketahanan pangan daerah</u>       |        |        |
| Tidak menjawab                       | 1      | 2.3    |
| Tidak tahan                          | 4      | 9.3    |
| Biasa saja                           | 20     | 46.5   |
| Tahan                                | 16     | 37.2   |
| Sangat tahan                         | 2      | 4.7    |

Persepsi subjek terhadap perhatian yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, propinsi, maupun pusat sangat dipengaruhi oleh hal yang mereka temui setiap hari dan mereka kerjakan. Data mengenai persepsi subjek mengenai perhatian pemerintah terhadap permasalahan ketahanan pangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persepsi subjek mengenai perhatian pemerintah terhadap permasalahan ketahanan pangan

| Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan | Jumlah | Persentase |
|------------------------------------|--------|------------|
| <u>Pemerintah Kabupaten</u>        |        |            |
| Tidak Tahu                         | 1      | 2.3        |
| Tidak ada perhatian                | 5      | 11.6       |
| Ada perhatian                      | 37     | 86.0       |
| <u>Pemerintah Propinsi</u>         |        |            |
| Tidak Tahu                         | 0      | 0          |

| Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan | Jumlah | Persentase |
|------------------------------------|--------|------------|
| Tidak ada perhatian                | 6      | 14.0       |
| Ada perhatian                      | 37     | 86.0       |
| <u>Pemerintah Pusat</u>            |        |            |
| Tidak Tahu                         | 0      | 0          |
| Tidak ada perhatian                | 5      | 11.6       |
| Ada perhatian                      | 38     | 88.4       |

Berdasarkan data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar subjek menyatakan bahwa pemerintah (kabupaten, propinsi, dan pusat) memberikan perhatian terhadap permasalahan ketahanan pangan. Besar subjek yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap permasalahan ketahanan pangan ialah 86.0 persen (perhatian pemerintah kabupaten dan propinsi) dan 88.4 persen (perhatian pemerintah pusat).

Subjek yang berpersepsi bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap permasalahan ketahanan pangan sedikit lebih besar kemungkinan karena keberadaan program-program dari pemerintah pusat yang cukup populer dan mereka anggap sebagai program yang dibuat untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Program-program yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, PNPM, serta sembako murah.

Subjek yang berasal dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah pada umumnya berpersepsi bahwa bentuk perhatian pemerintah terhadap permasalahan ketahanan pangan diwujudkan dalam berbagai bentuk program yang dibuat untuk meningkatkan pemenuhan masyarakat terhadap pangan. Program yang dimaksud adalah BLT, raskin, dan sembako murah. Beberapa subjek memberikan jawaban yang sangat dipengaruhi oleh pekerjaan/instansi tempat mereka bekerja, seperti subjek yang berasal dari Dinas Pertanian menyebutkan bahwa bentuk perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberian benih dan pupuk, pendirian organisasi ketahanan pangan (BKP), sementara yang berasal dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa bentuk perhatian pemerintah diantaranya melalui program PMT dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih belum merupakan hal yang dipahami secara umum (termasuk kalangan tokoh masyarakat serta instansi pemerintah). Oleh karena itu, sosialisasi mengenai ketahanan pangan sangat diperlukan karena dengan peningkatan sosialisasi diharapkan pemahaman masyarakat juga akan meningkat sehingga dukungan untuk berbagai program ketahanan pangan dapat meningkat karena mereka paham manfaat yang akan mereka peroleh.

#### **Persepsi Pejabat dan Tokoh tentang Sukses-Gagal Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan**

Identifikasi faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan program ketahanan pangan di kabupaten Serang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan pangan penduduk (ditinjau dari pencapaian

produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan status gizi), serta kelembagaannya.

Berdasarkan analisis SWOT program yang terkait dengan kebutuhan ketahanan pangan penduduk, maka dapat disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan program tersebut, yang dilihat dari empat dimensi: kebijakan dan program, potensi wilayah, kelembagaan dan kondisi sosial-budaya ekonomi masyarakat. Hasil analisis SWOT secara lengkap tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis faktor kesuksesan dan kegagalan program ketahanan pangan di Kabupaten Serang

|                 | Masalah   | Kekuatan  | Tantangan   | Peluang   |
|-----------------|---|---|---|---|
| Produksi Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana terbatas</li> <li>2. SDM yang rendah</li> <li>3. Modal kecil</li> <li>4. Ketersediaan air dan pengairan masih kurang</li> <li>5. Alih fungsi lahan, kebutuhan pangan banyak sedang lahan tak bertambah</li> <li>6. Distribusi pupuk dan pestisida kurang</li> <li>7. Diversifikasi kurang</li> <li>8. Pola tanam belum sama</li> <li>9. PPL belum optimal bekerja</li> <li>10. Teknologi masih terbatas</li> <li>11. Kurangnya bibit sayur dan buah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah pertanian dan kelautan cukup luas</li> <li>2. Ketersediaan tenaga kerja</li> <li>3. Akses tol merak-jkt-bdng memudahkan transportasi</li> <li>4. Produksi padi melimpah (surplus)</li> <li>5. Kelembagaan kelompok tani dan gapoktan cukup baik</li> <li>6. Kelembagaan pemerintah menunjang</li> <li>7. Keberpihakan dari kebijakan pemerintah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda dpt menyerap hasil produksi agar tak keluar daerah</li> <li>2. Peningkatan produktivitas lahan</li> <li>3. Agar masyarakat tidak kekurangan pangan (gizi buruk)</li> <li>4. Swasembada pangan</li> <li>5. Musim kemarau</li> <li>6. Memanfaatkan lahan kosong dan tadah hujan yang belum optimal digunakan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakarta mrpkan pasar potensial</li> <li>2. Kebutuhan produksi pangan tiap tahun meningkat</li> <li>3. Pasar lokal tersedia</li> <li>4. APBD/APBN mencukupi untuk membuat bendungan</li> </ol> |
| Ketersediaan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju penduduk lbh cepat dr produksi beberapa bhn makanan</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia lumbung pangan masy</li> <li>2. Produksi beberapa komoditas pangan diatas</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak tengkulak luar daerah yg membeli hasil sebelum panen</li> <li>2. Adanya cadangan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak lahan tidur</li> <li>2. Peningkatan kualitas pangan</li> </ol>   |

|                     | Masalah   | Kekuatan  | Tantangan  | Peluang  |
|---------------------|---|---|--|--|
|                     | lahan dan air belum optimal<br>3. Belum tersedia beras bermutu<br>4. Penanganan pasca panen lemah (hasil produksi cepat busuk)<br>5. Banyak lahan garapan (bukan milik) petani  | kebutuhan<br>3. Kebijakan pemerintah  | pangan daerah<br>3. Banyak beras dioplos<br>4. Adanya pasokan barang dari luar daerah<br>5. Peningkatan daya beli masyarakat dan pemerataan  |  |
| Distribusi          | 1. Pasar lokal terbatas<br>2. Tidak semua akses jalan baik<br>3. Produksi yg tak merata antar daerah krn kondisi alam berbeda<br>4. Tempat terpencil sulit dijangkau<br>5. Harga saat panen turun<br>6. Banyak hasil produksi keluar daerah krn harga lebih tinggi<br>7. Belum ada lembaga distribusi<br>8. Belum dapat dibeli secara murah dan bermutu<br>9. Banyak pengusaha menimbun beras, sehingga langka dan mahal<br>10. Adanya persaingan harga | 1. Penangan pasca panen<br>2. Jarak tidak terlalu jauh dan alat angkut relatif banyak<br>3. Dapat dibeli secara murah<br>4. Adanya kebijakan/regulasi dari pemerintah | 1. Harga tidak stabil dan berbeda antar wilayah<br>2. Pemenuhan kebutuhan secara tepat waktu dan jumlah<br>3. Kualitas pangan dari luar lebih baik<br>4. Keterjangkauan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pokok<br>5. Adanya spekulasi | 1. Masih banyak lahan<br>2. Lahan bisa dimanfaatkan<br>3. Alat transportasi dan jaringan transport memadai<br>4. Pasar luar cukup tersedia |
| Konsumsi dan Status | 1. Pengetahuan masy msh   | 1. Produksi pangan lokal  | 1. Banyaknya makanan   | 1. Produksi pangan lokal   |

## Kuasa Pengetahuan Ketahanan

|      | Masalah   | Kekuatan  | Tantangan   | Peluang   |
|------|---|---|---|---|
| Gizi | <p>rendah terhadap pangan dan gizi</p> <p>2. Kebiasaan makan sulit diubah</p> <p>3. Belum diterapkan penganekaragaman pangan lokal, konsumsi didominasi beras</p> <p>4. Relatif rendah konsumsi aneka ragam pangan</p> <p>5. Belum maksimal pemanfaatan pangan lokal</p> <p>6. Gizi masyarakat masih rendah, masih banyak anak BGM</p> <p>7. Masih banyak penduduk miskin</p> | <p>banyak dan masih banyak pekarangan belum termanfaatkan</p> <p>2. Adanya program dari dinas kesehatan dan dukungan APBD/APBN</p> <p>3. Ada kartu JAMKESMAS/as kes</p> <p>4. Adanya peningkatan pelayanan posyandu</p> <p>5. Adanya pengenalan diversifikasi makanan</p> | <p>instan</p> <p>2. Iklan makanan menyesatkan</p> <p>3. Gengsi meningkat bila makan makanan luar negeri</p> <p>4. Adanya tuntutan akan kualitas pangan</p> <p>5. Perlu koordinasi antar dinas terkait untuk meningkatkan kecukupan konsumsi dan status gizi masyarakat</p> <p>6. Kualitas SDM harus meningkat</p> | <p>cukup beragam</p> <p>2. Pemenuhan norma gizi</p> |

### Persepsi Kepala Rumahtangga tentang Ketahanan Pangan

Berdasarkan data tentang persepsi Kepala Rumahtangga tentang ketahanan pangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan masih rendah. Dalam hal ketahanan pangan individu menunjukkan bahwa sebagian besar (98.6 persen) tidak mengetahui maksud ketahanan pangan individu. Pengetahuan subjek tentang ketahanan pangan dapat terkelompok menjadi tiga yakni (1) 4 sehat 5 sempurna, (2) kebutuhan pangan seseorang, dan (3) menjaga kesehatan tubuh. Bertumpu pada tingkat pengetahuan tentang ketahanan pangan individu tersebut, kepala rumahtangga mempersepsikan ketahanan pangan individunya menyebar dimana sebagian (50 persen) mengatakan tahan, 31.3 persen tidak tahan dan bahkan 0.5 persen menyatakan sangat tidak tahan.

Tabel 7. Persepsi kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan

| No  | Peubah   | Kecamatan<br>Ciruas |      | Kecamatan<br>Pontang |      | Total |      |
|-----|--|---------------------|------|----------------------|------|-------|------|
|     |  | n                   | %    | n                    | %    | n     | %    |
| 1.  | Tahu makna Ketahanan Pangan Individu           |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak tahu                                  | 105                 | 100  | 106                  | 97.2 | 211   | 98.6 |
|     | b. Tahu  | 0                   | 0    | 3                    | 2.8  | 3     | 1.4  |
| 2.  | Benar makna Ketahanan Pangan Individu          |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Salah (tidak menjawab)                      | 105                 | 100  | 106                  | 97.2 | 211   | 98.6 |
|     | b. Salah (menjawab)                            | 0                   | 0    | 3                    | 2.8  | 3     | 1.4  |
| 3.  | Pengertian ketahanan pangan individu           |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak menjawab/tidak tahu                   | 105                 | 100  | 106                  | 97.2 | 211   | 98.1 |
|     | b. 4 sehat 5 sempurna                          | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
|     | c. Kebutuhan pangan seseorang                  | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
|     | d. Menjaga kesehatan tubuh                     | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
| 4.  | Persepsi terhadap Ketahanan Pangan individu    |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak menjawab/tidak tahu                   | 0                   | 0    | 3                    | 2.8  | 3     | 1.4  |
|     | b. Sangat tidak tahan                          | 1                   | 1.0  | 0                    | 0    | 1     | 0.5  |
|     | c. Sangat tidak tahan                          | 28                  | 26.7 | 39                   | 35.8 | 67    | 31.3 |
|     | d. Tidak tahan                                 | 53                  | 50.5 | 54                   | 49.5 | 107   | 50.0 |
|     | e. Biasa saja                                  | 23                  | 21.9 | 13                   | 11.9 | 36    | 16.8 |
|     | e. Tahan                                       |                     |      |                      |      |       |      |
| 5.  | Tahu makna Ketahanan Pangan rumahtangga        |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak tahu                                  | 105                 | 100  | 108                  | 99.1 | 213   | 99.5 |
|     | b. Tahu  | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
| 6.  | Benar makna Ketahanan Pangan rumahtangga       |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Salah (tidak menjawab)                      | 105                 | 100  | 108                  | 99.1 | 213   | 99.5 |
|     | b. Salah (menjawab)                            | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
| 7.  | Persepsi terhadap Ketahanan Pangan rumahtangga |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak menjawab/tidak tahu                   | 0                   | 0    | 3                    | 2.8  | 3     | 1.4  |
|     | b. Sangat tidak tahan                          | 1                   | 1.0  | 0                    | 0    | 1     | 0.5  |
|     | c. Sangat tidak tahan                          | 26                  | 24.8 | 36                   | 33.0 | 62    | 29.0 |
|     | d. Tidak tahan                                 | 53                  | 50.5 | 58                   | 53.2 | 111   | 51.9 |
|     | e. Biasa saja                                  | 25                  | 23.8 | 12                   | 11.0 | 37    | 17.3 |
|     | e. Tahan                                       |                     |      |                      |      |       |      |
| 8.  | Tahu makna Ketahanan Pangan daerah             |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak tahu                                  | 105                 | 100  | 108                  | 99.1 | 213   | 99.5 |
|     | b. Tahu  | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
| 9.  | Benar makna Ketahanan Pangan daerah            |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Salah (tidak menjawab)                      | 105                 | 100  | 108                  | 99.1 | 213   | 99.5 |
|     | b. Salah (menjawab)                            | 0                   | 0    | 1                    | 0.9  | 1     | 0.5  |
| 10. | Persepsi terhadap Ketahanan Pangan daerah      |                     |      |                      |      |       |      |
|     | a. Tidak menjawab/tidak tahu                   | 0                   | 0    | 3                    | 2.8  | 3     | 1.4  |
|     | a. Tidak menjawab/tidak tahu                   | 2                   | 1.9  | 0                    | 0    | 2     | 0.9  |

*Kuasa Pengetahuan Ketahanan*

| No  | Peubah                          | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|-----|---------------------------------|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|     |                                 | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
|     | b. Sangat tidak tahan           | 26               | 24.8 | 40                | 36.7 | 66    | 30.8 |
|     | c. Tidak tahan                  | 52               | 49.5 | 51                | 46.8 | 103   | 48.1 |
|     | d. Biasa saja                   | 25               | 23.8 | 15                | 13.8 | 40    | 18.7 |
|     | e. Tahan                        |                  |      |                   |      |       |      |
| 11. | Ada perhatian pemerintah daerah |                  |      |                   |      |       |      |
|     | a. Tidak ada                    | 55               | 52.4 | 52                | 47.7 | 107   | 50.0 |
|     | b. Ada                          | 50               | 47.6 | 54                | 49.5 | 104   | 48.6 |
|     | c. Tidak tahu                   | 0                | 0    | 3                 | 2.8  | 3     | 1.4  |
| 12. | Ada perhatian pemerintah pusat  |                  |      |                   |      |       |      |
|     | a. Tidak ada                    | 73               | 69.5 | 56                | 51.4 | 129   | 60.3 |
|     | b. Ada                          | 32               | 30.5 | 50                | 45.9 | 82    | 38.3 |
|     | c. Tidak tahu                   | 0                | 0    | 3                 | 2.8  | 3     | 1.4  |

Dalam hal pengetahuan tentang ketahanan pangan rumahtangga, hampir semua kepala rumahtangga (99.5%) juga menyatakan tidak tahu maksud ketahanan pangan rumahtangga. Persepsi kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan rumahtangga mereka juga menyebar dari biasa saja, tahan dan tidak tahan. Hal yang sama juga terjadi ketika ditanyakan tentang persepsi ketahanan pangan daerah, persepsi kepala rumahtangga juga menyebar dari biasa saja, tahan dan tidak tahan.

Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditanggapi secara berbeda oleh kepala rumahtangga. Dalam hal pemerintah daerah maka masih terjadi keseimbangan antara yang menjawab ada (48.6%) dan tidak ada (50.0%). Sementara untuk pemerintah pusat, persepsi kepala rumahtangga lebih banyak menyatakan bahwa tidak ada perhatian pemerintah pusat (60.3%), dan lebih sedikit menyatakan ada perhatian pemerintah pusat (38.3%).

Pengetahuan kepala rumahtangga tentang jenis perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat di dua kecamatan sangat tersebar, antara lain: 1) bantuan pangan (RASKIN, PMT), 2) selain bantuan pangan (RASKIN, PMT) juga BLT (Bantuan Langsung Tunai), 3) selain bantuan pangan (RASKIN, PMT) juga BBM/gas, 4) selain bantuan pangan (RASKIN, PMT) juga sembako murah.

Tabel 8. Sebaran kepala rumahtangga menurut jenis perhatian pemerintah daerah

| Jenis perhatian                                       | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|---|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|   | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
| Bantuan BBM/gas                                       | 1                | 1.0  | 1                 | 0.9  | 2     | 0.9  |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll)                     | 17               | 16.2 | 7                 | 6.4  | 24    | 11.2 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan bantuan BBM/gas | 5                | 4.8  | 12                | 11.0 | 17    | 7.9  |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan BLT             | 6                | 5.7  | 14                | 12.8 | 20    | 9.3  |

| Jenis perhatian  | Kecamatan Ciruas |     | Kecamatan Pontang |     | Total |     |
|--|------------------|-----|-------------------|-----|-------|-----|
|  | n                | %   | n                 | %   | n     | %   |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan sembako murah                        | 10               | 9.5 | 5                 | 4.6 | 15    | 7.0 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan subsidi pupuk                        | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), bantuan BBM/gas, dan sembako murah      | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, bantuan BBM/gas, dan sembako murah | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, dan askes/jamkesmas                | 3                | 2.9 | 0                 | 0   | 3     | 1.4 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, dan bantuan BBM/gas                | 1                | 1.0 | 2                 | 1.8 | 3     | 1.4 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, dan sembako murah                  | 1                | 1.0 | 1                 | 0.9 | 2     | 0.9 |
| Bantuan pendidikan (BOS, dll) BLT  | 1                | 1.0 | 0                 | 0   | 1     | 0.5 |
| BLT  | 5                | 4.8 | 6                 | 5.5 | 11    | 5.1 |
| BLT, bantuan pendidikan (BOS, dll)   | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| Pinjaman untuk nelayan   | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| PNPM   | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |

Demikian pula pengetahuan kepala rumahtangga tentang jenis perhatian pemerintah pusat juga sangat menyebar, antara lain: 1) BLT (Bantuan Langsung Tunai), 2) Bantuan pangan (RASKIN, PMT) dan BLT, 3) Bantuan Pangan (RASKIN, PMT) saja. Hal ini juga menunjukkan masih sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program-program ketahanan pangan yang ada di desanya.

Tabel 9. Sebaran kepala rumahtangga menurut jenis perhatian pemerintah pusat

| Jenis perhatian pemerintah pusat                                      | Kecamatan Ciruas |     | Kecamatan Pontang |     | Total |     |
|---|------------------|-----|-------------------|-----|-------|-----|
|   | n                | %   | n                 | %   | n     | %   |
| Bantuan BBM/gas   | 3                | 2.9 | 6                 | 5.5 | 9     | 4.2 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll)                                     | 8                | 7.6 | 2                 | 1.8 | 10    | 4.7 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan bantuan BBM/gas                 | 1                | 1.0 | 0                 | 0   | 1     | 0.5 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan BLT                             | 4                | 3.8 | 7                 | 6.4 | 11    | 5.1 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) dan sembako murah                   | 0                | 0   | 1                 | 0.9 | 1     | 0.5 |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), bantuan BBM/gas, dan sembako murah | 1                | 1.0 | 1                 | 0.9 | 2     | 0.9 |

| Jenis perhatian pemerintah pusat                            | Kecamatan Ciruas |     | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|---|------------------|-----|-------------------|------|-------|------|
|   | n                | %   | n                 | %    | n     | %    |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, dan askes/jamkesmas | 1                | 1.0 | 0                 | 0    | 1     | 0.5  |
| Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll), BLT, dan bantuan BBM/gas | 1                | 1.0 | 3                 | 2.8  | 4     | 1.9  |
| Bantuan pendidikan (BOS, dll)                               | 0                | 0   | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| BLT   | 8                | 7.6 | 21                | 19.3 | 29    | 13.5 |
| BLT, bantuan BBM/gas  | 1                | 1.0 | 5                 | 4.6  | 6     | 2.8  |
| BLT, bantuan pendidikan (BOS, dll)                          | 0                | 0   | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| BLT, bibit unggul   | 0                | 0   | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| BLT, PNPM   | 1                | 1.0 | 0                 | 0    | 1     | 0.5  |
| PNPM  | 1                | 1.0 | 1                 | 0.9  | 2     | 0.9  |
| Sembako murah   | 2                | 1.9 | 0                 | 0    | 2     | 0.9  |

Selanjutnya, terkait program bantuan pemerintah yang didapatkan oleh kepala rumahtangga dan keluarganya, maka berdasarkan tingkat penyebarannya di dua kecamatan berturut-turut adalah: 1) Raskin, 2) Askeskin (asuransi kesehatan orang miskin), 3) BLT (Bantuan Langsung Tunai), 4) Sembako murah. Meskipun demikian ada sekitar 23.4% kepala rumahtangga yang menyatakan tidak mendapatkan bantuan program dari pemerintah.

Dalam hal sejauhmana program bantuan pemerintah tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, maka sebaran kepala rumahtangga adalah sebagai berikut: 45.3% menyatakan dapat memenuhi kebutuhan, namun masih ada 54.7% yang masih menyatakan kadang-kadang memenuhi kebutuhan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Program-program ketahanan pangan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan yang paling banyak disebut oleh rumahtangga contoh adalah program RASKIN, BLT, sembako murah dan BBM.

Tabel 10. Program bantuan pemerintah yang didapatkan rumahtangga

| No  | Program                         | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|-----|---------------------------------|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|     |                                 | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
| 1.  | Tidak dapat program pemerintah  | 29               | 27.6 | 21                | 19.3 | 50    | 23.4 |
| 2.  | Dapat program BLT               | 44               | 41.9 | 40                | 36.7 | 84    | 39.3 |
| 3.  | Dapat program Raskin            | 104              | 99.0 | 105               | 96.3 | 209   | 97.7 |
| 4.  | Dapat program Askeskin          | 41               | 39.0 | 49                | 45.0 | 90    | 42.1 |
| 5.  | Dapat program sembako murah     | 19               | 18.1 | 64                | 58.7 | 83    | 38.8 |
| 6.  | Dapat program BOS               | 19               | 18.1 | 17                | 15.6 | 36    | 16.8 |
| 7.  | Dapat program keluarga harapan  | 0                | 0    | 0                 | 0    | 0     | 0    |
| 8.  | Dapat program PMT               | 1                | 1.0  | 0                 | 0    | 1     | 0.5  |
| 9.  | Dapat program bantuan modal     | 0                | 0    | 0                 | 0    | 0     | 0    |
| 10. | Dapat program bantuan teknologi | 0                | 0    | 0                 | 0    | 0     | 0    |
| 11. | Dapat program kredit            | 0                | 0    | 0                 | 0    | 0     | 0    |
| 12. | Dapat program lainnya           | 73               | 69.5 | 83                | 76.1 | 156   | 72.9 |

| No  | Program                                    | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|-----|--|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|     |  | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
| 13. | Program dapat membantu memenuhi kebutuhan: | 22               | 21.0 | 25                | 22.9 | 47    | 22.0 |
|     | • Tidak memenuhi kebutuhan                 | 49               | 46.7 | 48                | 44.0 | 97    | 45.3 |
|     | • Memenuhi kebutuhan                       | 34               | 32.4 | 36                | 33.0 | 70    | 32.7 |
|     | • Kadang-kadang memenuhi kebutuhan         |                  |      |                   |      |       |      |

Dalam hal keberhasilan, maka sebagian rumahtangga contoh (41.1%) menyatakan berhasil. Bila membanding antar dua kecamatan, maka rumahtangga contoh di kecamatan Pontang (45.0%) relatif lebih banyak menyatakan berhasil dibanding rumahtangga contoh di kecamatan Ciruas.

Tabel 11. Keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin, Sembako Murah

| Keberhasilan program | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|----------------------|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|                      | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
| Berhasil             | 39               | 37.1 | 49                | 45.0 | 88    | 41.1 |
| Tidak berhasil       | 17               | 16.2 | 17                | 15.6 | 34    | 15.9 |
| Tidak tahu           | 49               | 46.7 | 43                | 39.4 | 92    | 43.0 |

Alasan keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin dan Sembako Murah dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 12. Alasan keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin, Sembako Murah

| Alasan Keberhasilan Program Ketahanan Pangan | Kecamatan Ciruas |      | Kecamatan Pontang |      | Total |      |
|--|------------------|------|-------------------|------|-------|------|
|  | n                | %    | n                 | %    | n     | %    |
| Tidak menjawab                               | 49               | 46.7 | 41                | 37.6 | 90    | 41.9 |
| Bisa dibeli dengan harga terjangkau          | 2                | 1.9  | 5                 | 4.6  | 7     | 3.3  |
| Jumlah/besarnya cukup                        | 0                | 0    | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| Jumlah/besarnya masih belum cukup            | 3                | 2.9  | 5                 | 4.6  | 8     | 3.7  |
| Membantu mencukupi kebutuhan                 | 22               | 21.0 | 18                | 16.5 | 40    | 18.6 |
| Pelaksanaan rutin dan lancar                 | 1                | 1.0  | 0                 | 0    | 1     | 0.5  |
| Pelaksanaan sesuai dengan peraturan          | 0                | 0    | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| Pelaksanaan tidak rutin dan lancar           | 7                | 6.7  | 2                 | 1.8  | 9     | 4.2  |
| Pembagian sudah merata                       | 9                | 8.6  | 6                 | 5.5  | 15    | 7.0  |
| Pemimpin (Lurah) bijaksana                   | 0                | 0    | 1                 | 0.9  | 1     | 0.5  |
| sampai ke masyarakat/sasaran                 | 3                | 2.9  | 11                | 10.1 | 14    | 6.5  |
| Tidak merata (tidak semua bisa dapat)        | 6                | 5.7  | 10                | 9.2  | 16    | 7.4  |
| Tidak tahu                                   | 3                | 2.8  | 8                 | 7.3  | 11    | 5.1  |

**Pengambil keputusan dalam menentukan menu makanan dan mengelola keuangan rumah tangga**

Pada umumnya dalam rumah tangga terjadi pembagian peran dan dan tanggung jawab antara suami dan isteri serta anak-anak. Biasanya isteri atau ibu mendapatkan peran domestic sedangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan luar atau kegiatan pasar dipegang oleh laki-laki atau ayah atau suami. Dalam hal makanan sehari-hari yang merupakan kegiatan domestik, maka akan dipegang oleh kaum perempuan.

Dalam menentukan menu sehari-hari, hampir 100% rumah tangga dipegang oleh ibu atau isteri. Namun demikian terdapat 3.3% subjek yang kegiatan menntukan menu diambil oleh anggota keluarga lain. Hal ini terjadi karena ibunya tidak tinggal di rumah (sudah meninggal atau bekerja di luar kota/negeri) dan keluarga masih tinggal bersama nenek, sehingga nenek yang mengaturnya. Sebaran rumah tangga contoh menurut pengambil keputusan dalam menentukan menu sehari-hari dan mengelola keuangan keluarga dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran rumah tangga contoh menurut yang dominan dalam menentukan menu dan mengelola keuangan

| kecukupan             | Kecamatan Ciruas |       | Kecamatan Pontang |       | Total |       |
|-----------------------|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
|                       | n                | %     | n                 | %     | n     | %     |
| a. menentukan menu    |                  |       |                   |       |       |       |
| - ayah                | -                | -     | 2                 | 1.8   | 2     | 0.9   |
| - ibu                 | 103              | 98.1  | 104               | 95.4  | 207   | 96.7  |
| - anak                | -                | -     | 2                 | 1.8   | 2     | 0.9   |
| - lainnya             | 2                | 1.9   | 1                 | 0.9   | 3     | 1.4   |
| Total                 | 105              | 100.0 | 109               | 100.0 | 214   | 100.0 |
| b. mengelola keuangan |                  |       |                   |       |       |       |
| - ayah                | -                | -     | 4                 | 3.7   | 4     | 1.9   |
| - ibu                 | 103              | 98.1  | 93                | 85.3  | 196   | 91.6  |
| - anak                | 1                | 1.0   | 11                | 10.1  | 12    | 5.6   |
| - lainnya             | 1                | 1.0   | 1                 | 0.9   | 2     | 0.9   |
| Total                 | 105              | 100.0 | 109               | 100.0 | 214   | 100.0 |

Di Kecamatan Pontang hampir semua subjek menyatakan bahwa menu makanan sehari-hari ditentukan oleh ibu. Namun demikian terdapai 1.9% rumah tangga yang menunya ditentukan oleh anggota keluarga lain, yaitu nenek. Sementara itu di Kecamatan Ciruas terdapat 4.6% rumah tangga yang dalam menentukan menu makanan sehari-hari bukan dipegang oleh ibu. Sebanyak 18% rumah tangga yang dalam menentukan menu dipegang oleh ayah, yaitu rumah tangga yang kebetulan ibunya bekerja di luar kota. Ada juga rumah tangga yang menunya ditentukan oleh anak. Hal ini juga karena ibunya tidak berada di rumah.

Pengambil keputusan dalam kegiatan mengelola keuangan ternyata tidak berbeda dengan kegiatan menentukan menu makan sehari-hari. Pada umumnya yang dominan melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga adalah ibu. Hal ini terjadi pada lebih dari 90% rumah tangga contoh. Rumah tangga contoh di Kecamatan Pontang bahkan tidak ada yang kegiatan mengelola

keuangan rumah tangga ditentukan oleh ayah. Sedangkan di Kecamatan Ciruas terdapat 3,7% rumah tangga yang kegiatan pengelolaan keuangan rumah tangga ditentukan oleh ayah.

Selain ibu dan ayah, ternyata anak juga ada yang sudah diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga. Hal ini terutama pada keluarga yang orang tuanya sedang bekerja di luar kota atau luar negeri. Di wilayah kajian banyak terdapat rumah tangga yang kepala keluarga atau ibunya bekerja di Cilegon, Jakarta, atau bahkan di luar negeri.

### **Intensitas Kerawanan Pangan Rumah Tangga**

Kerawanan pangan terjadi apabila rumah tangga, masyarakat, atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Menurut Suryana 2004, kerawanan pangan dibedakan atas kerawanan kronis dan kerawanan sementara. Kerawanan kronis yaitu terjadi terus menerus karena ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri. Sedangkan kerawanan sementara terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau bencana lainnya. Jika kerawanan pangan terjadi secara terus menerus maka akan berdampak pada status gizi dan kesehatan.

Menurut Smith 2003 kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga atau individu dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif melalui 4 jenis keadaan, yaitu: 1) ketidakcukupan energi rumah tangga, 2) tingkat ketidakcukupan energi, 3) keanekaragaman makanan, dan 4) proporsi pengeluaran untuk makanan. Sementara itu FAO 2003 mengukur kelaparan melalui tingkat ketidakcukupan energi yang ditunjukkan dengan deficit jumlah konsumsi kalori pada seseorang di bawah konsumsi energi yang dianjurkan (<70% kebutuhan energi).

Secara kualitatif, rawan pangan dapat diukur melalui persepsi individu atau rumah tangga terhadap konsumsi makanan sehari-hari. Dalam penelitian ini kerawanan pangan tingkat rumah tangga didekati dengan 12 butir pertanyaan mengenai persepsi subjek terhadap kondisi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh anggota rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator yang paling sering dikhawatirkan oleh rumah tangga adalah tidak dapat menyediakan makanan bergizi seimbang untuk rumah tangga dan anak-anak (butir ke 4 dan 5). Kekhawatiran ini dirasakan hampir setiap minggu, bahkan ada yang hampir setiap hari oleh ibu rumah tangga contoh. Kekhawatiran yang setiap minggu dirasakan oleh rumah tangga contoh adalah persediaan makanan pokok di rumah habis (butir 1) dan persediaan makanan pokok sedikit dan tidak punya uang untuk membeli (butir 2). Kekhawatiran yang dirasakan hampir setiap bulan ada 3 butir (5, 6, dan butir 7) yaitu: Anak-anak tidak memperoleh makanan yang cukup, merasa sangat lapar dan tidak ada makanan di rumah, dan ada anggota keluarga selain anak yang mengurangi makan karena tidak cukup makanan. Sedangkan indikator yang lain yaitu butir 8, 9, 10, 11, dan 12 jarang atau tidak pernah dirasakan oleh rumah tangga contoh.

Tabel 14. Rataan skor kerawanan pangan rumah tangga contoh

| Indikator kerawanan pangan   | Kecamatan Ciruas | Kecamatan Pontang | Total |
|--|------------------|-------------------|-------|
| 1. Khawatir persediaan makanan pokok di rumah habis  | 2.2              | 2.0               | 2.1   |
| 2. Persediaan makanan pokok sedikit dan tidak punya uang untuk membeli   | 2.5              | 2.6               | 2.5   |
| 3. Tidak dapat menyediakan makanan bergizi seimbang untuk rumah tangga   | 1.8              | 1.9               | 1.9   |
| 4. Tidak dapat menyediakan makanan bergizi seimbang untuk anak   | 2.0              | 2.1               | 2.0   |
| 5. Anak-anak tidak memperoleh makanan yang cukup   | 4.0              | 3.8               | 3.9   |
| 6. Merasa sangat lapar dan tidak ada makanan di rumah  | 4.0              | 3.5               | 3.7   |
| 7. Ada anggota keluarga selain anak yang mengurangi makan karena tidak cukup makanan                                 | 3.7              | 3.7               | 3.7   |
| 8. Mengurangi porsi makan untuk anak karena tidak cukup makanan  | 4.0              | 4.1               | 4.1   |
| 9. Ada anggota keluarga dewasa selain anak tidak makan seharian karena tidak punya uang                              | 4.4              | 4.4               | 4.4   |
| 10. Ada anak tidak makan karena tidak punya uang   | 4.7              | 4.6               | 4.7   |
| 11. Ada anak yang mengalami penurunan berat badan karena kurang makan atau tidak mampu membeli makanan               | 4.4              | 4.7               | 4.6   |
| 12. Ada anggota keluarga dewasa mengalami penurunan berat badan karena kurang makan atau tidak mampu membeli makanan | 4.5              | 4.7               | 4.6   |
| IKP  | 42.3             | 42.2              | 42.2  |

### Coping Strategi Rumah tangga

Jika suatu rumah tangga mengalami masalah kekurangan pangan, maka secara otomatis setiap rumah tangga akan melakukan tindakan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Hal inilah yang disebut dengan *coping* strategi. Jika menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan makanan yang diperlukan, atau tiba-tiba ada kejadian yang membuat rumah tangga memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, maka berbagai hal dilakukan untuk mengatasinya.

*Coping strategy* menurut Sen (2003) adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan menurut kemampuan fisik, kemampuan biologi, maupun kemampuan material. Usfar 2002 mengungkapkan bahwa tindakan food coping dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: 1) melakukan aktivitas yang mendatangkan pendapatan,

Yang menarik dalam menentukan urutan prioritas adalah dalam hal menjual asset produktif seperti lahan sawah, pekarangan, atau alat produksi (perahu, alat tangkap, cangkul, dsb). Rumah tangg di daerah rawan pangan memilih alternative tersebut sebagai urutan hampir terakhir (urutan ke 10) setelah menjual asset non produktif di urutan 5. Sedangkan rumah tangga di daerah tahan pangan menjual asset produktif di urutan ke lima sebelum menjual asset non produktif. Hal ini bisa terjadi antara lain karena memang jumlah asset produktif yang dimiliki oleh rumah tangga di daerah tahan pangan lebih banyak dari pada di daerah rawan pangan, sehingga jika dijual sebagian rumah tangga masih memiliki asset produktif untuk digunakan sebagai alat untuk menghasilkan pangan atau pendapatan.

Meskipun terjadi perbedaan urutan prioritas coping antara rumah tangga di daerah rawan pangan dengan daerah tahan pangan, namun rumah tangga di kedua wilayah tersebut sama-sama menjadikan pernyataan untuk mengalihkan pangan pokok utama ke jenis lain sebagai alternative terakhir ketika terjadi kekurangan makanan. Hal ini karena mereka masih menganggap kalau belum makan nasi namanya belum makan. Bahan makanan pokok yang lain seperti singkong, ubi, dan jagung hanya dijadikan sebagai selingan atau makanan kudapan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: Ketahanan pangan individu, rumahtangga dan daerah terbangun atas relasi-relasi kekuatan pengetahuan yang dimiliki baik individu, rumahtangga maupun daerah dalam bentuk kuasa pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan antara individu, rumahtangga maupun pejabat. Kuasa pengetahuan ketahanan pangan yang tidak sama menyebabkan persepsi berbeda-beda sehingga ketahanan pangan dimaknai berbeda-beda yang pada akhirnya cara pencapaian ketahanan pangan juga berbeda. Perbedaan kuasa pengetahuan antara individu, rumahtangga dan pejabat/tokoh masyarakat menyebabkan perbedaan dalam pencapaian program ketahanan pangan.

### **Saran**

Untuk mencapai ketahanan pangan baik individu, rumahtangga maupun daerah, perlu adanya upaya untuk memahami relasi-relasi kuasa pengetahuan yang sedang berkembang baik ditingkat individu maupun di tingkat komunitas. Program ketahanan pangan perlu dirancang berdasarkan kuasa pengetahuan yang ada di komunitas, sehingga program akan tepat sasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiyanto R dan Lukito RP. 1997. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. PKSW-UI dan Asia Foundation. Jakarta.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan. 2004. *Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Boeke JS. 1953. *Economics and Econic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. Institut of Pacific Relation. New York.
- Breman J dan Gunawan W. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa*. Pustaka LP3ES.

2) melakukan perubahan diet (pola makan), 3) berbagai cara untuk mengakses atau mendapatkan makanan, 4) berbagai cara untuk mengakses (mendapatkan) uang, dan 5) melakukan migrasi atau mengurangi jumlah anggota keluarga.

Dalam kajian ini coping strategi yang ditawarkan terdiri dari 12 butir pernyataan. Namun demikian, jika rumah tangga tidak pernah mengalami permasalahan kekurangan pangan, tentu saja mereka tidak akan mengambil tindakan coping strategi. Hal ini juga terjadi di lokasi kajian. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ciruas dan Pontang sebagian besar rumah tangga (93.9%) melakukan coping strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Urutan atau prioritas pertama yang banyak dipilih oleh rumah tangga baik di Kecamatan Ciruas sebagai wilayah rawan pangan dan Kecamatan Pontang sebagai wilayah tahan pangan adalah meminjam uang kepada orang lain (hutang di warung atau meminjam tetangga). Urutan kedua yang dipilih oleh rumah tangga contoh selanjutnya baru meminjam uang kepada saudara atau kerabat. Alasan yang mendasari pilihan pertama yaitu meminjam uang kepada orang lain, bukan kepada kerabat atau saudara, adalah karena umumnya saudara atau kerabat bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal mereka. Jadi yang paling mudah dan dekat adalah berhutang di warung dekat rumah atau meminjam uang kepada tetangga.

Tabel 15. Persentase rumah tangga contoh yang melakukan *coping strategy* utama dalam mengatasi kesulitan memperoleh makanan

| Strategi Koping  | Urutan/prioritas |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | Kecamatan Ciruas | Kecamatan Pontang |
| 1. Mengalihkan pangan pokok utama ke jenis lain yang lebih murah | 11               | 11                |
| 2. Mengurangi jumlah pangan yang dimakan                         | 3                | 4                 |
| 3. Mengurangi frekuensi makan per hari                           | 6                | 6                 |
| 4. Meminta bantuan pangan  | 5                | 3                 |
| 5. Meminjam uang pada saudara/kerabat                            | 2                | 2                 |
| 6. Meminjam uang pada orang lain                                 | 1                | 1                 |
| 7. Menjual asset non produktif                                   | 9                | 8                 |
| 8. Tidak membayar biaya/uang sekolah anak                        | 7                | 9                 |
| 9. Laki-laki mencari pekerjaan di tempat lain                    | 4                | 7                 |
| 10. Menjual asset produktif                                      | 10               | 5                 |
| 11. Menghentikan pendidikan/sekolah anak                         | 8                | 10                |

Tabel 15 menunjukkan urutan coping strategi yang dipilih oleh rumah tangga di kecamatan yang rawan pangan dan tahan pangan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan urutan yang dipilih oleh rumah tangga di kedua kecamatan tersebut, kecuali urutan pertama, kedua, keenam, dan urutan terakhir (ke-11).

- Indonesia. Jakarta.
- Chambers R. 1987. *Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ and G. Conway. 1992. *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21 st century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: IDS.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 - 2009*. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Dube SC. 1988. *"Modernization and Development" : The Search for Alternative Paradigms.* Zed Books. London.
- Fedderke J et.al. 1999. *Economic Growth and Social Capital: A Critical Reflection*. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.
- Fukuyama F. 2001. *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third World Quarterly.
- Geertz C. 1974. *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Jawa*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Gilchrist A. 2004. *The Well-Connected Community: A Networking Approach to Community Development*. The Policy Press. University of Bristol, Bristol.
- Hardinsyah. 2001. *Pembangunan Pangan di Era Ekonomi Daerah Prosuding Dialog dan Loka Karya Kebijakan dan Program Pangan, Ketahanan Pangan di Era Ekonomi..* Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
- Hayami Y. 1985. *"Pertumbuhan dan Pemerataan : Saling Meniadakan Kah ? "* dalam Dinamika Pembangunan Pedesaan. PT. Gramedia. Jakarta.
- Kasryno F dan Stepanek JF. 1985. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. YOI dan PT. Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*. Penerbit Universitas. Jakarta.
- , 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. UI. Press. Jakarta.
- Korten DC dan Syahrir (penyunting). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Marzali A. 1999. *Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Jurnal Fisip. UI. Jakarta.
- Pakpahan A. dkk. 2004. *Membangun Pertanian Indonesia : Bekerja, Bermartabat dan Sejahtera*. DPP Himpunan Alumni IPB.
- Pranadji T. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Membangun Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Badan Litbang dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Redfield R. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Rajawali. Jakarta.
- Sanders IT. 1958. *The Community: An Introduction to a Social System*. The Ronald Press Company. New York.
- Sen A. 1981. *Poverty and Famines, An Essay on Entitlement and Deprivation*.
- Scoones I. 1998. *Sustainable rural Lifelihood: A framework for Analysis*. Institute of Development Studies.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama Bandung.
- Tonny FN. 2006. *"Kemitraan dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Perdesaaan dalam Perspektif Kelembagaan"* dalam *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*. PSP3-IPB dan Partnership of Governance Reform in Indonesia - UNDP.
- , 2006. *Pengembangan Masyarakat*. Bahan Kuliah Bagian Sosiologi Pedesaan dan Pengemangan Masyarakat Dept.KPM - FEMA IPB (tidak diterbitkan)
- Tjondronegoro MPS. 1977. *Social Organization and Planed Depelopment in Rural Java : Study of The Organizational Phenomenom in Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java*. Oxford University Press. New York.
- Uphoff N. 1992. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. Gatekeeper series

- no.31.
- Winter I. 2000. *Toward a Theorised Understanding of Family Life and Social Capital*. Working Paper No. 21, April 2000. Australian Institute of Family Studies.
- Wolf ER. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Rajawali Press. Jakarta.
- Yin RK. 2000. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindi Persada. Jakarta.
- Handewi PS, Rachman dan Mewa Ariani. 2002. *Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi*. FAE. Vol 20. No.1 . Juli 2002.
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Rakyat Indonesia*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun I. No.1. Maret 2002.
- Sajogjo. 1982. "Modernization Without Development in Rural Java." *The Journal of Social Studies*. 1982. Dacca, Bangladesh.